

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 Pasal Satu Ayat 12 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa “Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak” (Indonesia, 2008).

Level dalam kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/pekerjaan. Kinerja organisasi yaitu pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi, serta tujuan organisasi. Selain itu kinerja organisasi menurut Dwiyanto dalam (Bintang & Widowati, 2017) kinerja organisasi publik dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain; :1) Produktifitas; :2) Kualitas Layanan; :3) Responsivitas; :4) Responsabilitas; :5) Akuntabilitas.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah salah satunya adalah pelayanan masyarakat dalam menyalurkan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah salah satunya bantuan pangan non tunai adalah bantuan berupa pangan dari pemerintah yang diberikan kepada

KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk di e-warong KUBE PKH/ pedagang Bank HIMBARA.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara berkembang seperti indonesia. Berbagai teori dan perkembangan terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Krisis telah membawa Indonesia pada peningkatan kemiskinan terutama sebagai efek dari gejolak krisis moneter. Dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “negara mengembangkan sistem sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial . salah satu program yaang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Non Tunai.

Kemiskinan membuat jutaan masyarakat tidak bisa mengeyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga . Sehingga, kemiskinan menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan menjadi terbatas. Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, peraturan ini menggantikan permensos sebelumnya dan mengatur program sembako yang merupakan pengembangan BPNT, memberikan pilihan dan

kendali yang lebih luas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. (catatan Permensos ini bisa saja diperbaharui dengan peraturan baru lainnya, seperti yang dicabut oleh Permensos No 4 Tahun 2023).

Berkaitan dengan Kinerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyalurkan Barang Bantuan Non Tunai (BPNT) tersebut kepada masyarakat Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait proses penyaluran barang bantuan sosial tersebut. Dimana kinerja pegawai dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data dari desa dan kelurahan mengenai warga yang kurang mampu, masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak valid nya data sebagaimana data yang diserahkan kepada desa dan kelurahan sangat berbeda dengan dari Dinas Sosial sehingga menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak diperbaharui apabila Dinas Sosial Kabupaten Amuntai Tengah berpatokan pada data yang notabane merupakan hasil rekap dari data tahun sebelumnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan jumlah Penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning ditahun 2025 jumlah penerima di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 15.781, di Kecamatan Amuntai Tengah berjumlah 2.136, dan di Desa datu Kuning berjumlah 88. beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya:

1. Masih ada penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah belum tepat sasaran pada penerima. Hal ini dapat dilihat masih banyak di antara warga desa tersebut yang tidak tersentuh oleh program ini padahal berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ada juga orang-orang yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tapi malah terdaftar sebagai penerima bantuan.
2. Kurang jelas waktu pencairan program BPNT setiap bulannya. Penerima bantuan sering kali tidak mendapat informasi kapan bantuan akan cair, sehingga mereka harus menunggu dalam waktu yang tidak tentu, bahkan ada yang datang berulang kali bertanya ke e-warung atau bertanya ke bagian aparat desa untuk memastikan pencairan sudah bisa dilakukan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan keluhan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan terhadap kinerja Dinas Sosial dan Pendamping Program.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program BPNT. Terlihat dari rendahnya partisipasi atau pemahaman warga Desa datu Kuning tentang mekanisme BPNT, seperti cara mengaktifkan kartu sembako atau melaporkan masalah penyaluran, yang menyebabkan banyak penerima tidak memanfaatkan bantuan secara maksimal (misalnya, kartu tidak digunakan karena takut atau kurang info). Hal ini sering disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial, baik melalui pertemuan desa maupun media lokal. Dampaknya, program BPNT kurang

berkelanjutan karena masyarakat merasa terpinggirkan, dan efektivitasnya secara keseluruhan menurun.

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas membuat penulis merasa penasaran sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penyaluran Barang Pangan Non Tunai Di Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah”** Dalam hal ini, dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyalurkan barang bantuan sosial yang dimaksud. Berhubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Efektivitas Kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan program penyaluran barang pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Menurut Budiani (dalam Dedi amrizal, dkk 2018: 59-60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Dinas Sosial dalam program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Desa Datu Kuning ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Datu Kuning ?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Dinas Sosial dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat miskin yang wajib mendapatkannya pada Desa Datu kuning Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Efektivitas dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai untuk masyarakat miskin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas Dinas Sosial dalam Program Penyaluran Bantuan Non Tunai untuk masyarakat yang kurang mampu di Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pemikiran seta dapat memberikan distribusi pada kantor yang bersangkutan untuk dapat menjadi acuan agar efektivitas program lebih baik lagi dari sebelumnya.

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk menjalankan penerapan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan relitas yang terjadi dilapangan, mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu program.
- 2) Untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis.

3. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan peneliti berikutnya dan menindak lanjuti dengan penelitian yang baru.